

KETEGANGAN POLITIK IRAN ANTARA SANKSI INTERNASIONAL DAN KONFLIK DOMESTIK

Fera Farwita¹, Adhi Munajar²

feraprb18@gmail.com, adhi.munajar@uin-suska.ac.id

Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru

Abstract

Political tensions in Iran result from the interaction between international sanctions and domestic conflict. Sanctions imposed mainly by the United States and its allies have constrained Iran's economy, limited policy flexibility, and intensified public dissatisfaction. Using a qualitative descriptive approach based on a literature review, this study analyzes the impact of external economic pressure on Iran's domestic political dynamics. The findings indicate that sanctions not only function as tools of external coercion but also exacerbate internal challenges, including economic instability, social unrest, and state-society tensions. In response, Iran has adopted resistance-based political strategies internationally while strengthening political control domestically. This interaction reinforces political instability and prolongs tension, suggesting that effective resolution requires an integrated approach addressing both geopolitical pressures and domestic political stability.

Keywords: Iran, international sanctions, domestic conflict, political tension

Abstrak

Ketegangan politik di Iran merupakan hasil dari interaksi antara sanksi internasional dan konflik domestik. Sanksi yang terutama diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya telah membatasi perekonomian Iran, mengurangi fleksibilitas kebijakan, dan meningkatkan ketidakpuasan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur untuk menganalisis dampak tekanan ekonomi eksternal terhadap dinamika politik domestik Iran. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tekanan eksternal, tetapi juga memperburuk tantangan internal, termasuk ketidakstabilan ekonomi, keresahan sosial, dan meningkatnya ketegangan antara negara dan masyarakat. Sebagai respons, Iran mengadopsi strategi politik berbasis resistensi di tingkat internasional sekaligus memperkuat kontrol politik di dalam negeri. Interaksi ini memperkuat ketidakstabilan politik dan memperpanjang ketegangan, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan terpadu yang mempertimbangkan tekanan geopolitik dan stabilitas politik domestik.

Kata kunci: Iran, sanksi internasional, konflik domestik, ketegangan politik

PENDAHULUAN

Ketegangan politik merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan internasional kontemporer, terutama ketika interaksi antara tekanan eksternal dan konflik domestik berlangsung secara simultan. Dalam konteks Timur Tengah, Iran menjadi salah satu negara yang secara konsisten berada dalam kondisi ketegangan politik berkepanjangan. Posisi geopolitik Iran yang strategis, kekayaan sumber daya energi, serta orientasi ideologi politiknya menjadikan negara ini sebagai aktor penting sekaligus kontroversial dalam sistem politik global. Sejak Revolusi Islam 1979, hubungan Iran dengan negara-negara Barat—khususnya Amerika Serikat—ditandai oleh konflik kepentingan, rivalitas ideologis, serta kebijakan sanksi internasional yang terus berulang.

Sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Iran, terutama terkait isu program nuklir, keamanan regional, dan hak asasi manusia, menjadi instrumen utama tekanan politik eksternal. Sanksi tersebut mencakup pembatasan perdagangan, pembekuan aset, pembatasan akses sistem keuangan internasional, serta larangan ekspor minyak. Dalam perspektif *International Political Economy*, sanksi tidak hanya bertujuan melemahkan kapasitas negara target secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas politik dan legitimasi pemerintah di dalam negeri. Dalam kasus Iran, tekanan ekonomi akibat sanksi telah menyebabkan inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Tekanan ekonomi yang berkepanjangan tersebut kemudian berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik domestik. Gelombang protes sosial, ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, serta meningkatnya ketegangan antara negara dan masyarakat menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Konflik domestik di Iran tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh persoalan politik, sosial, dan budaya yang kompleks. Dalam kerangka *State–Society Relations*, kondisi ini menunjukkan melemahnya kontrak sosial antara negara dan warga, di mana negara dituntut untuk menjaga stabilitas politik di tengah keterbatasan sumber daya akibat tekanan eksternal.

Interaksi antara sanksi internasional dan konflik domestik menciptakan dinamika ketegangan politik yang saling memperkuat. Tekanan eksternal memperburuk kondisi internal, sementara instabilitas domestik mempersempit ruang diplomasi Iran di tingkat internasional.

Kondisi ini mendorong Iran untuk mengadopsi strategi politik berbasis resistensi, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam pengelolaan politik domestik. Di tingkat internasional, Iran cenderung mengambil sikap konfrontatif terhadap negara-negara pemberi sanksi, sementara di tingkat domestik pemerintah memperkuat kontrol politik untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan rezim. Fenomena ini sejalan dengan pendekatan *Security Dilemma* dan *Regime Survival Theory*, yang menjelaskan bagaimana negara di bawah tekanan eksternal cenderung memprioritaskan keamanan dan stabilitas politik internal.

Ketegangan politik Iran tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi tunggal, baik eksternal maupun internal. Kompleksitas hubungan antara sanksi internasional dan konflik domestik menunjukkan bahwa keduanya saling berinteraksi dalam membentuk dinamika politik Iran secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami bagaimana tekanan geopolitik global dan dinamika politik domestik saling memengaruhi dan membentuk ketegangan politik yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan politik Iran dengan menitikberatkan pada interaksi antara sanksi internasional dan konflik domestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur untuk mengkaji dampak tekanan eksternal terhadap dinamika politik internal Iran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian geopolitik dan hubungan internasional, serta memperkaya pemahaman mengenai bagaimana sanksi internasional dan konflik domestik berperan dalam membentuk ketegangan politik suatu negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami ketegangan politik Iran yang terbentuk dari interaksi antara sanksi internasional dan konflik domestik melalui analisis dokumen, literatur ilmiah, serta data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena fenomena ketegangan politik Iran merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, melibatkan dinamika geopolitik, ekonomi politik internasional, stabilitas keamanan, serta hubungan negara dan masyarakat, sehingga lebih tepat dianalisis melalui penalaran interpretatif dan kajian mendalam terhadap konteks politik yang melingkupinya.

Melalui metode ini, penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif berbagai isu utama terkait sanksi internasional terhadap Iran, seperti dampak tekanan ekonomi eksternal terhadap legitimasi politik pemerintah, pengaruh sanksi terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta implikasinya terhadap meningkatnya konflik dan ketegangan domestik. Selain itu, pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan analisis terhadap strategi politik Iran dalam merespons tekanan eksternal, baik melalui kebijakan luar negeri berbasis resistensi maupun melalui penguatan kontrol politik di dalam negeri.

Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi berbagai tantangan politik yang dihadapi Iran, termasuk keterbatasan ruang kebijakan akibat sanksi, tekanan politik domestik, gelombang protes sosial, serta dilema antara menjaga stabilitas rezim dan memenuhi tuntutan kesejahteraan publik. Studi literatur digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pola interaksi antara faktor eksternal dan internal, serta untuk memahami bagaimana ketegangan politik tersebut berkembang dan berulang dalam jangka panjang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan politik di Iran merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara sanksi internasional dan dinamika konflik domestik. Sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya tidak hanya membatasi aktivitas perdagangan dan ekspor minyak Iran, tetapi juga menghambat akses negara tersebut terhadap sistem keuangan global. Dampak dari kebijakan ini terlihat jelas pada melemahnya struktur ekonomi nasional, yang ditandai oleh inflasi yang tinggi, penurunan nilai mata uang, meningkatnya angka pengangguran, serta menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang memburuk ini kemudian memengaruhi stabilitas politik dengan melemahkan legitimasi pemerintah, terutama ketika negara dinilai tidak mampu menjamin kesejahteraan publik di tengah tekanan eksternal yang berkelanjutan.

Tekanan ekonomi yang dihasilkan oleh sanksi internasional berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya konflik domestik di Iran. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah memicu berbagai gelombang protes sosial di sejumlah wilayah. Protes tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan publik yang tidak

hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dengan keterbatasan ruang partisipasi politik, ketimpangan sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan masyarakat mengalami ketegangan yang semakin tajam, di mana tuntutan publik terhadap perubahan kebijakan sering kali berhadapan dengan respons negara yang bersifat represif.

Dalam menghadapi tekanan eksternal dan konflik domestik yang semakin kompleks, Iran mengembangkan strategi politik yang berorientasi pada resistensi dan keamanan. Di tingkat internasional, Iran cenderung mengambil sikap konfrontatif terhadap negara-negara pemberi sanksi, sembari memperluas kerja sama ekonomi dan politik dengan negara-negara non-Barat sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap sistem internasional yang didominasi Barat. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan politik serta menunjukkan ketahanan negara di tengah tekanan global. Namun, pilihan kebijakan tersebut juga mempersempit ruang diplomasi dan memperpanjang isolasi internasional Iran. Di tingkat domestik, pemerintah Iran memperkuat kontrol politik dan keamanan sebagai langkah untuk menjaga stabilitas internal dan kelangsungan rezim. Penguatan peran aparat keamanan, pembatasan aktivitas oposisi, serta pengawasan terhadap media dan ruang publik menjadi instrumen utama dalam merespons potensi instabilitas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal mendorong negara untuk memprioritaskan keamanan dan stabilitas politik dibandingkan reformasi struktural yang lebih inklusif. Akibatnya, kebijakan domestik yang bersifat koersif justru berpotensi memperdalam ketegangan antara negara dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi internasional dan konflik domestik saling berinteraksi dalam membentuk siklus ketegangan politik yang berkelanjutan di Iran. Tekanan eksternal memperburuk kondisi ekonomi dan sosial internal, sementara instabilitas domestik mempersempit ruang manuver politik Iran di tingkat internasional. Interaksi ini menjadikan ketegangan politik Iran bersifat struktural dan sulit diselesaikan tanpa pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, penyelesaian ketegangan politik di Iran memerlukan strategi terpadu yang tidak hanya berfokus pada tekanan geopolitik eksternal, tetapi juga pada upaya memperkuat stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri.

Pembahasan

Ketegangan politik di Iran tidak dapat dipahami sebagai dampak tunggal dari sanksi internasional maupun konflik domestik semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi dinamis antara tekanan eksternal dan kondisi internal negara. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan dalam kajian *International Political Economy* yang menyatakan bahwa sanksi ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat tekanan politik antarnegara, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas politik domestik negara target. Dalam konteks Iran, sanksi internasional yang berkelanjutan telah menciptakan tekanan struktural terhadap perekonomian nasional, yang pada akhirnya memengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat.

Dampak ekonomi dari sanksi internasional, seperti inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang, dan meningkatnya pengangguran, berkontribusi pada melemahnya legitimasi pemerintah di mata publik. Ketika negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, muncul persepsi kegagalan negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan. Kondisi ini sejalan dengan teori *state legitimacy* yang menekankan bahwa legitimasi politik sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menjamin stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, tekanan eksternal melalui sanksi secara tidak langsung mendorong munculnya ketegangan domestik dengan memperlemah fondasi legitimasi rezim.

Konflik domestik di Iran menunjukkan memburuknya hubungan antara negara dan masyarakat. Protes sosial yang muncul tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan partisipasi politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap represif. Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi pilihan antara melakukan reformasi atau menjaga stabilitas melalui pendekatan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iran lebih memilih memperkuat kontrol politik dan keamanan sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas di tengah tekanan internal dan eksternal.

Pilihan strategi politik berbasis resistensi dan keamanan ini dapat dijelaskan melalui perspektif *regime survival theory*, yang menyatakan bahwa rezim yang berada di bawah tekanan cenderung memprioritaskan kelangsungan kekuasaan dibandingkan perubahan struktural. Di tingkat internasional, sikap konfrontatif Iran terhadap negara-negara Barat dan upaya membangun kerja sama dengan negara non-Barat merupakan bentuk perlawanan terhadap tatanan global yang dianggap tidak adil. Namun, strategi ini juga memiliki konsekuensi berupa

isolasi internasional yang berkepanjangan, yang justru memperkuat dampak sanksi terhadap perekonomian nasional.

Interaksi antara sanksi internasional dan konflik domestik membentuk suatu siklus ketegangan politik yang saling memperkuat. Tekanan eksternal memperburuk kondisi internal, sementara instabilitas domestik digunakan sebagai justifikasi bagi negara-negara pemberi sanksi untuk mempertahankan atau memperketat kebijakan tekanan mereka. Siklus ini menjadikan ketegangan politik Iran bersifat struktural dan berjangka panjang. Tanpa adanya perubahan signifikan baik dalam pendekatan internasional terhadap Iran maupun dalam kebijakan domestik Iran sendiri, ketegangan politik cenderung terus berulang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian ketegangan politik Iran membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Ketegangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui tekanan internasional atau kebijakan keamanan di dalam negeri saja, tetapi juga memerlukan diplomasi yang terbuka serta perbaikan kebijakan internal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Temuan ini membantu memahami bahwa sanksi internasional dan konflik domestik saling memengaruhi dalam membentuk dinamika politik Iran, terutama dalam konteks geopolitik Timur Tengah.

KESIMPULAN

Ketegangan politik Iran mencerminkan interaksi kompleks antara tekanan geopolitik eksternal dan dinamika politik domestik. Sanksi internasional yang diberlakukan, terutama terkait isu program nuklir dan keamanan regional, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tekanan politik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan stabilitas politik internal. Dampak ekonomi sanksi, seperti inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang, dan keterbatasan akses ke sistem keuangan global, telah memperlemah legitimasi pemerintah serta memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat, yang kemudian memicu meningkatnya konflik dan protes sosial.

Iran cenderung mengadopsi strategi politik berbasis resistensi dengan memprioritaskan stabilitas dan keamanan dibandingkan reformasi politik yang lebih inklusif. Penguatan kontrol domestik serta upaya diversifikasi hubungan internasional ke luar orbit Barat menunjukkan adaptasi negara terhadap tekanan global, namun sekaligus memperkuat siklus ketegangan politik

yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Dengan demikian, ketegangan politik Iran tidak dapat dipahami secara terpisah antara faktor internal dan eksternal, melainkan sebagai proses saling memengaruhi yang membentuk dinamika politik Iran dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar komunitas internasional, khususnya negara-negara pemberi sanksi, mengevaluasi kembali efektivitas sanksi ekonomi yang cenderung memperburuk kondisi sosial dan politik domestik Iran, sehingga pendekatan diplomatik yang lebih dialogis dan konstruktif perlu dikedepankan. Di sisi lain, pemerintah Iran diharapkan mampu menyeimbangkan strategi resistensi eksternal dengan kebijakan domestik yang lebih inklusif melalui perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan ruang partisipasi publik guna memperkuat legitimasi politik dan stabilitas internal. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode yang lebih beragam dan empiris agar pemahaman mengenai interaksi antara sanksi internasional dan konflik domestik dapat dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Akhir tatanan dunia Amerika*. Cambridge: Polity Press.
- BBC News. (2022). *Gelombang protes di Iran: Penyebab dan dinamika demonstrasi nasional*. BBC.
- Biersteker, T. J., Eckert, S. E., & Tourinho, M. (2016). *Sanksi terarah: Dampak dan efektivitas tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Drezner, D. W. (2011). Sanksi cerdas dalam teori dan praktik. *International Studies Review*, 13(1), 96–108.
- Esfandiary, D., & Tabatabai, A. (2015). *Kebijakan Iran terhadap ISIS*. London: IISS.
- Ghasseminejad, S. (2019). *Sanksi Amerika Serikat dan perekonomian Iran*. Washington DC: Foundation for Defense of Democracies.
- Hinnebusch, R. (2015). *Politik internasional Timur Tengah*. Manchester: Manchester University Press.
- International Monetary Fund. (2023). *Indikator ekonomi Republik Islam Iran*. Dana Moneter Internasional.
- Katzman, K. (2020). *Sanksi terhadap Iran*. Washington DC: Congressional Research Service.

- Pape, R. A. (1997). Mengapa sanksi ekonomi tidak efektif. *International Security*, 22(2), 90–136.
- Robinson, K. (2023). *Apa saja sanksi terhadap Iran?* Council on Foreign Relations.
- Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (2016). *Kebijakan luar negeri: Teori, aktor, dan studi kasus*. Oxford: Oxford University Press.
- Takeyh, R. (2021). *Shah terakhir: Amerika Serikat, Iran, dan runtuhnya Dinasti Pahlavi*. Yale: Yale University Press.